

PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMUDA SEBAGAI HAK PEMENUHAN DEMOKRASI KECAMATAN ALALAK, BARITO KUALA

Muhammad Abdurrohim¹⁾, Radita Gora Tayibnapis²⁾, Jerry Indrawan³⁾,
Putrawan Yulianti⁴⁾, Ermita Ekalia⁵⁾, Andina Mustika Ayu⁶⁾

^{1),6)} Universitas Satya Negara Indonesia (USNI) Jakarta, Indonesia

^{2), 3), 4)} Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Indonesia

⁵⁾ Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia

e-mail: m.abdurrohim@usni.ac.id

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema pendidikan politik menysasar pemuda di Kelurahan Handil Bakti sebagai kelompok sasaran berupa sosialisasi. Kegiatan pengabdian ini termasuk dalam tema sosialisasi politik langsung seperti perkembangan politik Indonesia, media dan politik serta komunikasi politik karena evolusi kampanye politik Indonesia saat ini. Survei dan sosialisasi adalah dua langkah implementasi layanan ini. Survei ini dilakukan untuk mempelajari lebih lanjut tentang persepsi kelompok sasaran tentang keterlibatan politik, dan proses sosialisasi berusaha untuk meningkatkan literasi politik dan meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab kaum muda sebagai warga negara. Karena keterlibatan politik adalah salah satu indikator kunci demokrasi dan sangat penting untuk memperbarui semangat demokrasi suatu bangsa, tujuan dari pendidikan politik ini adalah untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas keterlibatan dalam siklus pemilihan.

KATA KUNCI: *Pendidikan Politik, Sosialisasi Politik, Partisipasi Politik, Pemberdayaan Pemuda.*

ABSTRACT

Community service activities with the theme of political education targeting youth in Handil Bakti Urban Village as target groups in the form of socialization. This service activity is included in the direct political socialization theme like the development of Indonesia politics, media and politics and political communication because the evolution of Indonesian political campaign nowadays. Survey and socialising are the two steps of this service's implementation. The survey was conducted to learn more about the target group's perceptions of political engagement, and the socialisation process sought to improve political literacy and raise awareness of young people's responsibilities as citizens. Because political engagement is one of the key indicators of democracy and is

crucial to renewing a nation's democratic spirit, the goal of this political education is to increase both the quantity and quality of involvement in the election cycle.

KEYWORDS: *Political Education, Political Socialization, Political Partisipastion, Youth Empowerment*

Accepted: July 20 2023	Reviewed: August 03 2023	Published: October 25 2023
---------------------------	-----------------------------	-------------------------------

PENDAHULUAN

Pasca terjadinya reformasi pada tahun 1998, Indonesia terus berkembang ke arah negara demokrasi yang lebih dewasa dengan menyelenggarakan pemilihan langsung kepada masyarakat. Demokrasi di Indonesia ini terus berkembang dengan bertambahnya umur dan partisipasi masyarakat yang masih tinggi membuat demokrasi kita memiliki karakteristik nya sendiri sesuai dengan perkembangan masyarakat. Namun, dengan adanya demokrasi yang menyediakan ruang – ruang yang luas bagi masyarakat untuk ikut terlibat dalam menentukan kepemimpinan politik, baik di tingkat nasional maupun daerah sering kali tidak dimanfaatkan dengan maksimal oleh beberapa kalangan. Hal ini juga tidak terlepas dari adanya beberapa praktik penyelenggaraan pemilihan yang tidak sesuai sehingga menghasilkan hasil yang tidak memuaskan. Ada tiga kategori malpraktik yang terjadi pada pemilihan di Indonesia, yaitu: *pertama*, pemilihan tanpa pemilihan; *kedua*, politik uang; dan *ketiga*, penyelenggara pemilihan yang tidak berintegritas (MANIK & ASSHIDIQIE, 2015).

Praktik – praktik yang terjadi tersebut membuat perkembangan kualitas demokrasi kita apabila terus dibiarkan mampu menurunkan kualitas hasil pemilihan yang ada. Kualitas hasil pemilihan yang rendah tentu saja akan berkontribusi langsung terhadap para elit yang muncul dari hasil pemilihan tersebut. Dengan rendahnya kualitas elit yang muncul akan cenderung berbanding paralel dengan kualitas kebijakan yang dihasilkan yang mana memiliki potensi bersifat elitis saja. Apabila pola – pola kebijakan yang dihasilkan hanya bersifat elitis saja, tanpa memperhatikan hasil kepada masyarakat, hal ini mampu membuat masyarakat cenderung antipati terhadap pemilihan kedepannya yang tentu saja akan membuat kualitas demokrasi kita semakin menurun. Kalangan pemuda menjadi salah satu kelompok masyarakat yang sangat rawan terhadap hal ini dikarenakan kebanyakan dari mereka merupakan pemilih pemula. Berpartisipasi dalam pemilihan dan proses politik tentu saja juga merupakan bagian dari proses bela negara yang bisa dilakukan masyarakat (Indrawan et al., 2021).

Pendidikan politik merupakan salah satu unsur yang bisa dikatakan sebagai proses bela negara kontemporer. Banyaknya kalangan yang hanya menganggap proses bela negara berkaitan dengan wajib militer dan sebagainya tentu saja banyak menghasilkan salah persepsi terhadap hal – hal yang bisa dilakukan terkait

bela negara tersebut. Bela negara memiliki unsur dinamis dan kontemporer dimana dinamis berarti unsur bela negara akan berkembang mengikuti zaman, dan kontemporer berarti memiliki konteks terkini yang berbeda dengan masa sebelumnya (Darmawan, 2013). Pemuda yang kebanyakan juga termasuk dalam kelompok pemilih pemula tentu saja perannya sangat krusial dalam demokrasi dan pemilihan di Indonesia.

Adanya kecendrungan terhadap pemilih pemula yang dimana memiliki informasi yang lebih sedikit daripada pemilih yang sudah berpengalaman. Kurangnya informasi ini membuat banyak pemilih pemula untuk tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan (Kaid et al., 2007). Dengan rendahnya informasi yang didapatkan pemilih pemula membuat kelompok ini rentan dijadikan sasaran untuk dilakukan mobilisasi kepentingan tertentu. Beberapa faktor yang mampu mendorong partisipasi pemilih pemula, yaitu: *pertama*, adanya dorongan dari media masa atau elektronik; *kedua*, kesadaran terkait pemilihan itu sendiri; *ketiga*, lingkungan politik yang ada di sekitar mereka; dan *keempat*, tingkat keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan (Wardhani, 2018). Faktor – faktor ini tentu saja dapat didorong apabila masyarakat, khususnya pemilih pemula mendapatkan pendidikan politik yang memadai terkait pemilihan.

Pemilihan yang bebas dan sehat merupakan salah satu unsur yang bisa menunjang perkembangan demokrasi suatu negara. Pemilihan sendiri memiliki esensi bahwa kedaulatan rakyat dikelola melalui pemungutan suara yang digunakan untuk menentukan kursi jabatan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan (Surbakti et al., 2014). Pentingnya proses pemilihan yang adil dan sehat tentu saja menjadikan pendidikan politik sebagai unsur yang penting guna meningkatkan kualitas keluaran dari hasil pemilu itu sendiri. Dikarenakan, Indonesia masih tergolong muda dalam menjalankan proses demokrasi ini, tentu saja banyak hal yang mesti perlu diperhatikan dalam memperbaiki kualitas yang dihasilkan.

Pemuda sebagai unsur penting dalam keberlanjutan demokrasi suatu negara perlu mendapatkan perhatian terkait pendidikan politik yang mereka dapatkan. Kurangnya informasi memadai terkait politik, terutama politik lokal atau daerah membuat para pemuda ini kurang aktif dalam mengikuti proses demokrasi di daerahnya. Apalagi dengan masuknya Indonesia pada periode pemilihan pada tahun mendatang, membuat peran pemuda harus terus diperhatikan posisinya, terutama di wilayah Barito Kuala, Kalimantan Selatan.

Dari data Bapan Pusat Statistik (BPS) yang dikeluarkan oleh pemerintah, penduduk Barito Kuala sendiri berjumlah 316.963 (Statistik, 2022). Dari data tersebut, rasio pemuda (18 – 34 tahun) memiliki porsi yang paling banyak dalam struktur masyarakat Barito Kuala secara keseluruhan. Namun, tinggi nya jumlah pemuda ini tidak berbanding lurus dengan kesadaran politik yang mereka miliki. Pada pemilihan kepala daerah terakhir pada tahun 2017, tingkat partisipasi pemilih di daerah Barito Kuala masih berada di bawah 75% (KPU, 2017). Masih rendahnya tingkat partisipasi pemilih di daerah Barito Kuala tentu saja perlu

menjadi perhatian dikarenakan dengan tingkat partisipasi yang rendah, hasil keluaran ataupun kualitas elit politik yang dihasilkan tidak bisa menjangkau masyarakat secara menyeluruh yang bisa berkontribusi terhadap pengurangan kualitas demokrasi Indonesia secara keseluruhan nantinya.

Melihat permasalahan ini, tim pengabdian tertarik untuk ikut serta dalam usaha memperbaiki kualitas demokrasi masyarakat, terutama di daerah Barito Kuala. Dengan memberikan pendidikan politik yang memadai diharapkan para pemuda Barito Kuala mampu menjadi unsur pendorong kemajuan demokrasi di daerahnya. Dengan meningkatkan partisipasi serta kualitas demokrasi, kedepannya kualitas elit politik maupun pemimpin politik yang muncul di daerah ini mampu menghadirkan sosok yang mumpuni secara kualitas serta kebijakan yang dihasilkan.

METODE PELAKSANAAN

Pertemuan antara pelaksana pengabdian dengan pihak Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala menyepakati adanya penyuluhan secara luring dengan pemuda Kelurahan Handil Bakti sebagai target peserta utama. Pembicara kegiatan penyuluhan berasal dari dosen - dosen Program Studi Hubungan Internasional Universitas Satya Neger Indonesia (USNI), yaitu Muhammad Abdurrohm dan Andina Mustika Ayu, dosen Ilmu Politik dan Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jakarta, yaitu Jerry Indrawan, Radita Gora dan Putrawan Yulindri, serta dibantu dari universitas lokal, Ermita Ekalia dari Universitas Lambung Mangkurat. Selanjutnya, karena sifat penyuluhan yang dilaksanakan secara luring dan harapan bahwa seminar ini bisa memberikan banyak manfaat bagi para pemuda terkait pendidikan politik serta dampaknya, maka dimungkinkan adanya peserta yang bukan berasal dari masyarakat Kelurahan Handil Bakti saja, namun masih dalam kategori pemuda yang berada di daerah Barito Kuala.

Pendaftaran kegiatan dilakukan oleh tim pengabdian dengan dibantu dari Kelurahan Handil Bakti untuk pendataan sehingga mereka bisa menentukan siapa saja masyarakat yang dapat mengikuti kegiatan penyuluhan luring ini. Pengabdian ini dilaksanakan pada hari Jumat, 27 Januari 2023 dari pukul 14.00 sampai dengan pukul 17.00 di hotel Grand Palm. Sesi dimulai dengan pemaparan materi oleh para dosen anggota pengabdian, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab sampai kegiatan penyuluhan luring berakhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran pendidikan politik yang krusial di negara demokrasi sebagai wahana untuk memberikan masyarakat terkait politik guna meningkatkan kesadaran masyarakat terkait politik dan ikut berpartisipasi dalam nya membuat hal ini

penting. Dalam melakukan pembelajaran politik dengan metode pendidikan politik bersifat dialogis, terbuka, rasional atau penyadaran. Dengan metode pendidikan politik seperti ini tentu saja berbeda dengan indoktrinasi politik karena lebih menekankan kepada dialog, bukan pembangkitan emosi dan bertujuan untuk peningkatan partisipasi politik daripada mobilisasi politik. Berbeda dengan dengan negaraa otoriter yang lebih menekankan terhadap indoktrinasi untuk menumbuhkan mobilisasi politik daripada pendidikan politik yang meningkatkan partisipasi politik (Cholisin, 2020).

Pendidikan politik sendiri juga dapat disebut sebagai *political forming* atau bidang (Sutrisman, 2019). Sebagai suatu proses, pendidikan politik dikatakan '*forming*' dikarenakan mengandung esensi untuk membentuk masyarakat atau insan politik yang menyadari status/kedudukan nya di masyarakat. Disebut '*bindung*' dikarenakan menyangkut aktivitas yang mampu membentuk diri sendiri, dengan memberi kesadaran penuh dan tanggung jawab sendiri untuk menjadi bagian insan politik itu sendiri.

Guna menunjang proses pembelajaran melalui luring dan secara langsung ini, tim membagi pemamapran menjadi beberapa tema besar yang diberikan kepada pemuda kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Barito Kuala. Dosen pertama adalah Muhammad Abdurrohim yang membuka pengabdian ini dengan gambaran besar politik Indonesia serta bagaimana perkembangan proses politik tersebut kepada para pemuda. Peserta dalam pengabdian ini akan mendapatkan perkembangan sejarah politik di Indonesia, terutama pasca orde baru proses politik yang terjadi.

Indonesia sebagai negara yang tergolong masih muda dalam menganut sistem demokrasi tentu saja melalui proses yang panjang dan naik turun dalam perkembangan demokrasi nya. Di bawah kepemimpinan orde baru yang otoriter, pemerintahan Indonesia yang sebelumnya sedang berkemabgn menuju proses demokrasi yang lebih baik berubah menjadi negara otoriter di bawah pengawasan militerisme yang kuat. Pasca runtuhnya order baru dan tejradinya reformasi di Indonesia, terjad proses desentralisasi yang menyebabkan daerah – daerah di Indonesia memiliki lebih banyak otoritas dan tidak bergantung sepenuhnya terhadap pengambilan keputusan di pusat (Aspinall & Fealy, 2020). Desentralisasi inilah yang membuat partisipasi masyarakat di daerah terkait pengambilan keputusan maupun kebijakan semakin tinggi, salah satunya melalui pemilihan. Umum.

Pemilihan yang terjadi di tingkat daerah di Indonesia sering kali memiliki tingkat persaingan yang tinggi dan memiliki margin yang kecil. Politik uang dan

ketokohan menjadi unsur yang sangat penting dalam menentukan siapa yang menjadi pemenang dalam pemilihan yang ada di daerah (Choi, 2011). Dikarenakan situasi seperti ini menyebabkan politik di daerah sering kali hanya didominasi elit – elit yang sudah ada. Dengan mengenal memahami perkembangan politik di Indonesia melalui pemamaparan pertama, para pemuda diharapkan mampu berpikir kritis untuk memahami kondisi politik yang terjadi di tingkat daerah dan peran mereka salah satu unsur yang bisa merubah tatanan yang sudah ada.



Gambar 1. Situasi pengabdian pendidikan politik dari pemaparan pertama

Dosen kedua yang melakukan pemaparan adalah Jerry Indrawan dan Radita Gora terkait media dan politik di Indonesia. Media tentu saja menjadi salah satu elemen penting dalam mengukur kualitas demokrasi di suatu negara. Peran antara media dan politik di Indonesia saling mempengaruhi satu sama lain sehingga akan terus berkembang sesuai dengan budaya dan kebiasaan yang dianut masyarakat Indonesia (Sen & Hill, 2007). Dengan situasi seperti ini para pemuda perlu memerhatikan perkembangan yang terjadi di media untuk membantu memahami situasi perkembangan politik yang terjadi itu sendiri.

Dengan terjadinya reformasi juga membuat peran media lebih terbuka daripada pada saat pemerintahan orde baru. Masa pemerintahan Soeharto salah satunya ditandai dengan pemberantasan kebebasan media dan akses media yang dikontrol oleh pemerintah sepenuhnya. Pasca runtuhnya orde baru, media banyak mendapatkan tempat untuk turut serta dalam membenentuk demokrasi di Indonesia itu sendiri, termasuk media – media di daerah. Media di daerah pada akhirnya menjadi salah satu corong demokrasi untuk proses demokrasi serta pemilihan yang sedang berjalan di daerah. Minimnya informasi yang didapatkan para masyarakat dari media acap kali menjadi salah satu alasan rendahnya keterlibatan masyarakat,

termasuk kalangan pemuda untuk ikut serta dalam pemilihan dan proses demokrasi. Hal ini mendorong tumbuhnya media – media daerah yang lebih plurasis yang tidak dikontrol oleh pusat lagi (Hill, 2007). Dengan banyaknya tumbuh media di daerah ini tentu saja akan berkontribusi terhadap penyehatan kualitas demokrasi yang berjalan di daerah.

Dalam pemaparan yang diberikan pemateri disebutkan bagaimana peran media dalam politik yang ada di Indonesia. Para pemuda yang pada hari ini merupakan *digital native* lebih banyak mengkonsumsi media online yang mana memiliki karakteristik berbeda dengan media konvensional yang ada. Pada survei awal yang dilakukan tim diketahui bahwa kebanyakan pemuda yang mengikuti program pengabdian pendidikan politik ini lebih banyak mendapatkan informasi dari sosial media. Adanya jenis media baru ini juga mendorong penyehatan demokrasi di Indonesia dikarenakan menciptakan ruang dialog publik yang beragam sehingga masyarakat bisa lebih mudah berpartisipasi terhadap isu yang sedang berkembang (Holik, 2010). Namun, pemateri menjabarkan bagaimana kita harus benar – benar kritis terhadap media yang kita konsumsi untuk mencari informasi, terutama yang berkaitan dengan politik itu sendiri.

Jenis media baru seperti sosial media pada hari ini banyak dikonsumsi pemuda sebagai sumber informasi, termasuk di Kelurahan Handil Bakti. Hal ini membuat sosial media telah berubah menjadi alat yang penting bagi para politisi dan masyarakat untuk berpartisipasi terhadap proses demokrasi yang terjadi, terutama pada saat pemilihan (Johansson, 2016). Sosial media telah berkembang menjadi alat penyebaran informasi untuk mempengaruhi, memotivasi dan melakukan tindakan yang diinginkan oleh penyebar atau pembuat pesan yang ada (Susanto, 2017). Dikarenakan rawannya sosial media menjadi alat untuk melakukan mobilisasi inilah yang membuat pemateri memaparkan peran – peran media ini terhadap proses politik yang terjadi sehingga para pemuda diharapkan mampu membentengi diri mereka terhadap informasi yang beredar, terutama terkait pemilihan dan proses politik yang terjadi.



Gambar 2. Situasi pengabdian pendidikan politik dari pemaparan kedua



Gambar 3. Situasi pengabdian pendidikan politik dari pemaparan kedua

Dosen ketiga yang melakukan pemaparan adalah Putrawan Yuliandri yang memberikan materi lanjutan dari media dan politik sebelumnya, yaitu komunikasi politik. Media tentu saja menjadi ruang komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat sehingga bagaimana komunikasi politik ini dilakukan dan dipahami mesti dipelajari. Komunikasi politik sendiri berarti konsep komunikasi berulang yang bisa memproduksi dan reproduksi makna tertentu (Craig, 1999). Komunikasi politik yang dilakukan pada proses demokrasi menjadi

perhatian dikarenakan efek atau makna yang dihasilkan mampu mempengaruhi kualitas dari demokrasi tersebut.

Dalam komunikasi politik yang dipaparkan oleh pemateri, ada beberapa dimensi yang perlu diperhatikan dalam menganalisa informasi yang didapat dari media yang berkaitan dengan unsur politik. Dimensi – dimensi tersebut sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Gadi Wolfsfeld yang berkaitan dengan komunikasi politik (Wolfsfeld, 2022), yaitu:

1. Kekuatan Politik dan Pengaruhnya terhadap Media
2. Kontrol Politik dan Kebebasan Media
3. Objektivitas Media
4. Cara Penyampaian Media
5. Dampak Media

Dimensi – dimensi komunikasi politik di atas perlu diperhatikan untuk pemuda mengingat pengaruh media yang mereka konsumsi akan berkontribusi langsung terhadap pemahaman politik yang mereka dapatkan. Apalagi di era sekarang yang dimana setiap unsur masyarakat yang tidak hanya sebagai konsumen media, namun juga bisa memproduksi medianya sendiri dikarenakan kemajuan sosial media. Pemateri menekankan perlunya kesadaran kita sebagai pemuda untuk bisa secara kritis menganalisa pesan – pesan yang disampaikan di media yang dikonsumsi agar kita tidak terjerumus ke hal – hal yang bisa merugikan kita maupun kepentingan kita. Terlebih lagi semakin maju nya media, khususnya sosial media membuat kita perlu berhati – hati memahami pesan dan komunikasi politik yang berlangsung di media tersebut.



Gambar 4. Situasi pengabdian pendidikan politik dari pemaparan ketiga

Dengan berakhirnya pemaparan dengan tiga tema besar yaitu, *pertama*, perkembangan politik di Indonesia; *kedua*, media dan politik di Indonesia; dan *ketiga*, komunikasi politik ini para memasuki sesi tanya jawab. Antara peserta dan pemateri saling berdiskusi terkait materi yang telah disampaikan sebelumnya. Para peserta pengabdian sangat tertarik dengan materi yang disampaikan dan menunjukkan perhatian yang besar terkait isu yang sedang disampaikan. Hal ini menunjukkan bahwa pemuda – pemuda yang mengikuti pengabdian pendidikan politik ini memberikan perhatian terkait politik yang berkembang di daerah mereka.

Setelah selesainya pemaparan yang diberikan terhadap 20 pemuda terpilih dari kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala ini, diharapkan para pemuda bisa secara kritis memahami proses politik yang terjadi di daerah mereka. Dengan adanya pendidikan politik ini, diharapkan para pemuda ini juga bisa mempengaruhi dan memberikan wawasan kepada orang di sekitar mereka terkait isu politik yang sedang berkembang di sekitar mereka. Dengan memberikan pendidikan politik yang berkualitas kedepan nya para pemuda ini bisa menjadi agen perubahan untuk proses demokrasi dan politik yang lebih baik di masa yang akan datang sehingga kualitas elit – elit politik pengampu kebijakan yang dihadirkan bisa lebih baik di masa yang akan datang.



Gambar 5. Photo bersama pemateri dan peserta



Gambar 6. Photo bersama pemateri dan peserta

SIMPULAN

Dari kegiatan pengabdian dalam bentuk pendidikan politik secara luring ini tentang pendidikan politik bagi pemuda sebagai pemenuhan hak demokrasi di Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Dari respon para peserta pengabdian yang memberikan antusias tinggi menunjukkan bahwa materi serta cara penyampaian yang diberikan membuat mereka tertarik untuk belajar lebih dalam terkait isu yang dibahas karena sesuai dengan kebutuhan mereka pada iklim demokrasi serta politik hari ini. Hal ini menunjukkan bahwa materi yang kami sampaikan memberikan kesadaran lebih terhadap para peserta terkait politik yang berkembang di Indonesia.

Para peserta pengabdian dengan tema pendidikan politik ini dapat secara langsung mempraktekkan materi – materi yang disampaikan di sekitar mereka serta diharapkan dapat menularkan apa yang mereka dapat ke orang – orang di sekitar mereka. Para pemuda ini juga memahami bahwa proses politik bukan hanya tanggung jawab para elit saja, namun kita sebagai masyarakat secara umum juga memiliki andil besar dalam proses politik dan demokrasi yang terjadi di Indonesia. Kedepannya diharapkan dengan materi yang disampaikan ini bisa membantu para pemuda untuk menjadi agen perubahan terkait politik di sekitar mereka di masa yang akan datang.

DAFTAR RUJUKAN

- Aspinall, E., & Fealy, G. (2020). *Local power and politics in Indonesia : decentralisation & democratisation*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Choi, N. (2011). *Local Politics in Indonesia: Pathways to Power: Routledge Contemporary Southeast Asia Series*. Taylor & Francis.
- Cholisin. (2020). *Ilmu Kewarganegaraan*. Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan UNY.
- Craig, R. T. (1999). Communication theory as a field. *Communication Theory*, 9(2), 119–161.
- Darmawan, C. (2013). Pendidikan Bela Negara dalam Konteks Keamanan Nasional, dalam Muradi (ed), *Penataan Kebijakan Keamanan Nasional. Bandung: Dian Cipta*.
- Hill, D. T. (2007). Manoeuvres in Manado: media and politics in regional Indonesia. *South East Asia Research*, 15(1), 5–28.
- Holik, I. (2010). Teknologi Baru Media Dan Demokratisasi Di Indonesia. *Makna: Jurnal Kajian Komunikasi, Bahasa, Dan Budaya*, 1(2), 41–57.
- Indrawan, J., Aji, M. P., & Ilmar, A. (2021). PENYULUHAN IMPLEMENTASI BELA NEGARA BAGI MASYARAKAT KELURAHAN REMPOA, KECAMATAN CIPUTAT TIMUR, TANGERANG SELATAN. *ABDI KAMI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 1–11.
- Johansson, A. C. (2016). Social media and politics in Indonesia. *Stockholm School of Economics Asia Working Paper*, 42(2).
- Kaid, L. L., McKinney, M. S., & Tedesco, J. C. (2007). Introduction: Political information efficacy and young voters. In *American Behavioral Scientist* (Vol. 50, Issue 9, pp. 1093–1111). Sage Publications Sage CA: Los Angeles, CA.
- KPU. (2017). *Portal Publikasi Pemilihan Kepala Daerah*. https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/t2/kalimantan_selatan/barito_kuala
- MANIK, H. K., & ASSHIDIQIE, D. R. J. (2015). *PEMILU DALAM PERSPEKTIF PENYELENGGARA*.
- Sen, K., & Hill, D. T. (2007). *Media, culture, and politics in Indonesia*. Equinox

Publishing.

Statistik, B. P. (2022). *Kabupaten Barito Kuala dalam Angka 2022*. BPS Barito Kuala.

Surbakti, R., Karim, A. G., Nugroho, K., Sujito, A., & Fitrianto, H. (2014). *Integritas Pemilu 2014: Kajian Pelanggaran, Kekerasan, dan Penyalahgunaan Uang pada Pemilu 2014*. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.

Susanto, E. H. (2017). Media sosial sebagai pendukung jaringan komunikasi politik. *Jurnal Aspikom*, 3(3), 379–398.

Sutrisman, D. (2019). *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, dan Mahasiswa*. Guepedia.

Wardhani, P. S. N. (2018). Partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan umum. *Jupii: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57–62.

Wolfsfeld, G. (2022). *Making sense of media and politics: Five principles in political communication*. Routledge.